

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. CAR dalam jangka panjang mempengaruhi penyaluran kredit UMKM bank BPD di Indonesia, dikarenakan asset bank BPD tidak lepas dari peran pemerintah daerah yang menyimpan dananya di BPD untuk realisasi program-program pemerintah daerah yang salah satu didalamnya terdapat program KUR. Sedangkan dalam jangka pendek penyaluran kredit UMKM BPD tidak dipengaruhi CAR, dikarenakan kemampuan BPD dalam membayar kembali simpanan masyarakat tidak diaplikasikan dalam penyaluran kredit UMKM.
2. CCR dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak mempengaruhi penyaluran kredit UMKM BPD di Indonesia dikarenakan BPD belum mampu secara positif dan signifikan meningkatkan permodalan sesuai dengan standar regulasi yang telah ditetapkan oleh BI dan OJK.
3. ROA dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki hubungan negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM BPD di Indonesia dikarenakan ROA yang mencerminkan tingkat keuntungan yang dicapai BPD, jika mengalami penurunan akan menghambat penyaluran kredit UMKM dalam jangka panjang dan pendek. Hal ini menunjukkan bahwa laba BPD belum dapat dikatakan berperan penting dalam kaitannya dengan penyaluran kredit UMKM BPD.
4. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dalam jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai hubungan yang negatif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM di Indonesia dikarenakan biaya operasional dan pendapatan operasional BPD

bersifat fluktuatif, dimana beban operasional BPD yang tinggi akan memberikan efek tunda jangka pendek dan panjang terhadap penyaluran kredit UMKM BPD.

5. LAR dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak mempengaruhi penyaluran kredit UMKM BPD di Indonesia dikarenakan Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan BPD dalam menyalurkan dananya tidak disalurkan ke sektor UMKM, namun ke sektor lain yang memberikan imbal hasil lebih pasti.

B. Saran

1. Untuk pemerintah dalam meningkatkan penyaluran kredit UMKM di Indonesia :
 - a. Penekanan pondasi yang kuat pada aspek modal keuangan Bank Pembangunan Daerah demi meningkatkan kinerja internal dan manajemen aset Bank Pembangunan Daerah.
 - b. Perlunya revitalisasi Bank Pembangunan Daerah demi menentukan kejelasan lingkup Bank Pembangunan Daerah dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 dan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Asosiasi Perbankan Indonesia sebagai bank yang hanya fokus pada salah satu segmen pasar tertentu sebagai spesialisasi kegiatan operasionalnya.
 - c. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemegang saham terbesar Bank Pembangunan Daerah, dapat berkomitmen dan mampu membuat kebijakan untuk lebih fokus kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mewujudkan kebijakan yang aplikatif dimana dana realisasi APBD dapat disalurkan secara luas dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja masyarakat daerah.
 - d. Perlunya jaminan dari pemerintah pusat maupun daerah atas penerbitan saham Bank Pembangunan Daerah agar penyaluran kredit dalam jangka panjang efisien dan tepat sasaran. Bank Pembangunan Daerah secara internal tidak bisa

mengandalkan dari beberapa sumber dana jangka pendek yaitu giro, tabungan dan deposit.

- e. Pemerintah pusat maupun daerah seharusnya tidak mempersulit proses regulasi penyaluran kredit UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat agar para pencari modal mendapat kemudahan dalam pengajuan agunan atau penjaminan, sehingga dapat mengakses kredit perbankan secara mudah dan cepat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat memasukkan variabel makroekonomi diluar penelitian dan variabel non ekonomi yang dapat meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah dan penyaluran kredit UMKM di Indonesia.